



Anggaran MBG untuk Upah Guru Honororer

SLEMAN—Alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di pos belanja tidak terduga (BTT) akan dialihkan untuk menambah upah guru honororer di Sleman.

Andreas Yuda Pramono
andreas.yuda@harianjogja.com

Anggota Komisi D DPRD Sleman, Wanto, mengatakan jajarannya bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman menggelar rapat koordinasi pada Senin (10/2). Rapat membahas penggunaan anggaran MBG yang sebelumnya telah dialokasikan Pemkab. "Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar anggaran dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah," katanya, Kamis (13/2).

Wanto mengatakan anggaran MBG yang ada terlalu besar apabila hanya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah. Karena itu, Komisi D dan Disdik berencana membagi anggaran untuk menambah upah guru honororer. "Belum ada kesepakatan. Tapi yang pasti, anggaran MBG dialihkan untuk sektor pendidikan," kata Wanto.

Meski demikian, arah pembicaraan dalam rapat mengarah pada rencana penambahan upah guru honororer. Wanto berharap nantinya upah guru honororer di atas UMP Rp2,26 juta.

► Komisi D dan Disdik berencana membagi anggaran untuk menambah upah guru honororer.

► Peningkatan kesejahteraan guru honororer dilakukan melalui insentif dengan nama fasilitasi GTT/PTT.

Selain upah, Wanto menyarankan pengalihan anggaran digunakan untuk menambah beasiswa anak sekolah. Saat ini, Pemkab baru mengalokasikan anggaran untuk beasiswa jenjang SD dan SMP. "Saat ini beasiswa untuk anak TK yang mau masuk SD belum ada. Ini perlu dipikirkan," katanya.

Wanto juga menyarankan agar 20% anggaran MBG dialihkan untuk mengurangi angka kemiskinan. "Ada anak putus sekolah karena situasi ekonomi orang tuanya yang tak mampu membayar SPP. Kalau perekonomian Sleman tertata baik, maka tidak ada kasus siswa putus sekolah karena tidak bisa membayar SPP," katanya.

Fasilitasi GTT

Plt. Kepala Disdik Sleman, Sri Adi Marsanto, mengatakan arah pembicaraan dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sleman mengarah pada peningkatan kesejahteraan

guru honororer.

Peningkatan kesejahteraan guru honororer dilakukan melalui insentif dengan nama fasilitasi guru tidak tetap (GTT)/ pegawai tidak tetap (PTT).

Anggaran fasilitasi GTT/PTT, sebenarnya sudah tercantum di APBD 2025, namun karena ada efisiensi, maka anggaran terpotong hingga Rp4 miliar.

Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Sleman, Sugeng Saefudin, mengatakan upah guru honororer/GTT bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri. "Pemkab hanya bisa memberi bantuan insentif untuk guru honororer lewat fasilitasi GTT/BTT. Tapi itu bukan upah, bentuknya penghargaan. Maka, ada kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapat penghargaan," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, fasilitasi GTT/PTT Disdik diberikan setiap dua bulan sekali. Bagi guru honororer, mereka harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar bisa mengakses fasilitasi tersebut.

Kriteria lain yakni mempertimbangkan durasi waktu mengajar minimal 10 jam per pekan dan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Masa kerja guru honororer juga menentukan besaran penghargaan.